

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemiskinan merupakan permasalahan yang masih dihadapi oleh beberapa negaranegara di dunia khususnya Indonesia. Kemiskinan merupakan suatu kondisi/keadaan ketidakmampuan individu/kelompok masyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidup. Kemiskinan disebabkan oleh faktor salah satunya yaitu SDM yang kurang memadai. Karena tidak mampu bersaing yang pada akhirnya menjadi pengangguran (Yulianti & Farina, 2020).

Masalah mengenai bantuan social merupakan suatu masalah yang cukup sering terjadi di Indonesia, khususnya pada ketepatan sasaran penerima bansos yang ada. Ketepatan penerimaan bansos ini merupakan hal yang sangat wajib untuk diperhitungkan karena dalam pengambilan keputusan tentunya sudah melewati beberapa proses seleksi atau survey terhadap calon penerima bansos. Sehingga dalam pengambilan keputusannya harus memiliki perhitungan yang akurat berdasarkan kriteria penerimaan bansos yang ada.

Bantuan yang diterima masyarakat miskin dalam bentuk Bantuan Pangan Non Tunai dalam bentuk Rastra atau Beras Untuk Keluarga Sejahtera yang sebelumnya bernama Raskin atau Beras Miskin. Perubahan nama bantuan terjadi pada tahun 2017 oleh Kementerian Sosial. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2008 tentang Kebijakan Perberasan, Perusahaan Umum (Perum) Badan Usaha Logistik (BULOG) yang diberikan penugasan oleh Pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan serta melakukan kegiatan persediaan, distribusi, dan kemudian juga untuk melakukan pengendalian terhadap harga beras yang ada melalui pengamanan stok beras, juga untuk pengamanan harga dasar beras dan penyalurannya (Karim et al., 2021).

Dinas Sosial Kota Padang Panjang Mempunyai tugas Membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan memberikan bantuan kepada masyarakat. Dalam penyeleksian masyarakat

harus memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah. Program keluarga harapan selama ini, masih bersifat *subyektif* (belum memiliki standar pemilihan yang baku), dimana koordinator kota merekomendasikan nama yang terpilih sebagai pendamping sosial terbaik. Pemberian (BPNT) diberikan berupa macam-macam sembako kepada masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan hidup (Treseli & Assegaff, 2021).

Sistem pendukung keputusan (SPK) atau Decision Support System (DSS) adalah sistem yang mampu memberikan kemampuan pemecahan masalah maupun kemampuan pengkomunikasian untuk masalah dengan kondisi semi terstruktur dan tak terstruktur. Sistem ini digunakan untuk membantu pengambilan keputusan dalam situasi semi terstruktur dan situasi yang tidak terstruktur, di mana tak seorang pun tahu secara pasti bagaimana keputusan seharusnya dibuat untuk memecahkan berbagai persoalan (Wibowo & Priandika, 2021).

Berdasarkan penelitian sebelumnya (Tri Handoyo, 2013) dalam menyeleksi suatu keputusan dibutuhkan sebuah sistem pendukung keputusan (SPK) agar keputusan yang didapat lebih akurat, cepat dan tidak subjektif. Salah satu metode SPK yang bisa diterapkan untuk Model optimasi untuk masalah-masalah dengan alternatif-alternatif dalam jumlah relatif kecil yaitu dengan metode *Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) karena metode TOPSIS memiliki beberapa kelebihan diantaranya yaitu konsepnya sederhana dan mudah dipahami, komputasinya efisien, dan memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif-alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana.

TOPSIS adalah salah satu metode pengambilan keputusan multikriteria atau alternative pilihan yang merupakan alternative yang mempunyai jarak terkecil dari solusi ideal positif dan jarak terbesar dari solusi ideal negatif dari sudut pandang geometris dengan menggunakan jarak Euclidean. Namun, alternatif yang mempunyai jarak terkecil dari solusi ideal positif, tidak harus mempunyai jarak terbesar dari solusi ideal negatif. Maka dari itu, TOPSIS mempertimbangkan keduanya, jarak terhadap solusi ideal positif dan jarak terhadap

solusi ideal negatif secara bersamaan. Solusi optimal dalam metode TOPSIS didapat dengan menentukan kedekatan relatif suatu alternatif terhadap solusi ideal positif. TOPSIS akan merangking alternative berdasarkan prioritas nilai kedekatan relatif suatu alternative terhadap solusi ideal positif. Alternatif-alternatif yang telah dirangking kemudian dijadikan sebagai referensi bagi pengambil keputusan untuk memilih solusi terbaik yang diinginkan (Muzakkir, 2017)

Berdasarkan penelitian sebelumnya (Santiary Dkk., 2018) berkesimpulan Metode *Technique for Order Performance by Similarity to Ideal Solution* (TOPSIS) merupakan salah satu metode dalam pengambilan keputusan, yang mana dalam menghasilkan sebuah keputusan akan memilih alternatif yang tidak hanya paling mendekati solusi ideal positif, akan tetapi juga paling jauh dari solusi ideal negatif. TOPSIS memberikan perankingan berdasarkan final score yang didapatkan dengan menghitung jarak dari solusi ideal positif dan negatif. Hasil perankingan yang diberikan oleh TOPSIS pada dasarnya berhasil memberikan perankingan dengan nilai yang berbeda- beda, kecuali pada dua buah alternatif yang diuji. Hal itu dikarenakan kesamaan nilai dari kedua alternatif pada setiap kriteria.

Metode TOPSIS banyak digunakan untuk menyelesaikan pengambilan keputusan secara praktis. Hal ini disebabkan konsepnya sederhana dan mudah dipahami. Penggunaan Suatu metode pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Berikut adalah kelebihan dan kekurangan penggunaan metode TOPSIS. Kelebihan penggunaan metode TOPSIS adalah (Ririn Wahyu Arida, 2021):

1. Konsepnya sederhana dan mudah dipahami, kesederhanaan ini dilihat dari alur proses metode TOPSIS yang tidak begitu rumit. Karena menggunakan indikator kriteria dan variabel alternatif sebagai pembantu untuk menentukan keputusan
2. Memiliki kemampuan untuk mengukur kinerja relatif dari alternatif-alternatif keputusan dalam bentuk matematis yang sederhana.
3. Dapat digunakan sebagai metode pengambilan keputusan yang lebih cepat

Setelah penulis melakukan peninjauan ke Dinas Sosial Kota Padang Panjang, penulis tertarik untuk membuat suatu sistem pendukung keputusan khususnya pada pengelolaan pembagian bantuan sosial yang dilakukan oleh Dinas Sosial, karena dalam hal ini ada beberapa kriteria yang dapat menentukan diterima atau tidaknya penerima bantuan sosial. Sehingga pekerjaan dari Dinas Sosial perihal pendataan penerima bantuan sosial lebih efektif dilakukan dan output yang dihasilkan sesuai dengan keinginan.

(Putri Dkk., 2021) menyatakan bahwa untuk Bantuan sosial itu sendiri itu bisa berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu dan atau rentan terhadap resiko sosial. Dalam sebuah Pelaksanaan kebijakan bantuan sosial yang banyak salah sasaran secara langsung memberikan dampak buruk kepada kebijakan bantuan sosial itu sendiri, Karena mengingat tujuan bantuan sosial untuk melindungi bagi masyarakat miskin yang terkena dampak dari COVID-19. Berdasarkan permasalahan tersebut maka perlu adanya upaya untuk memperbaiki kebijakan bantuan sosial ini khususnya dalam masalah penetapan Rumah Tangga Sasaran (RTS), sehingga kedepannya kebijakan bantuan sosial, baik yang akan diberikan oleh pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah akan berjalan dengan optimal dan berdampak secara positif bagi Rumah Tangga Sasaran (RTS).

Berdasarkan objek penelitian yang telah penulis pilih, tentu saja memiliki kekurangan dan kelebihan. Kelebihan dari objek penelitian penulis adalah :

1. Kantor Dinas Sosial merupakan suatu instansi pemerintah yang bergerak dalam bidang social, salah satunya bantuan social. Dengan penulis membahas tentang bantuan social ini penulis secara tidak langsung dapat memahami bagaimana pengurusan dan prosedur bagaimana suatu kepala keluarga dapat ditetapkan

sebagai calon penerima bantuan hingga menjadi berhak menerima bantuan social.

2. Dengan adanya penelitian yang penulis lakukan di Kantor Dinas Sosial ini penulis secara tidak langsung membantu pihak instansi dalam mempersingkat waktu untuk melakukan sebuah proses pengambilan keputusan. Sehingga dampak baik yang dirasakan akan sampai juga kepada masyarakat.

Kekurangan dari objek penelitian penulis adalah karena ini berhubungan dengan data pribadi suatu keluarga, maka penulis agak sedikit kesulitan dalam melakukan proses permintaan data. Karena data calon penerima bantuan merupakan data yang dikelola langsung oleh instansi pemerintah dan berhubungan dengan data privasi dari masing-masing calon penerima bantuan social. Maka dari itu untuk meminimalisir tingkat bahaya dalam kebocoran data, pihak instansi sedikit membatasi penulis dalam hal permintaan data untuk kebutuhan penelitian.

Dengan pertimbangan tersebut dan pribadi penulis yang ingin menerapkan pengetahuan yang telah diperoleh maka penulis tertarik untuk membuat suatu sistem informasi yang berjudul **“ANALISA DAN PERANCANGAN *DECISION SUPPORT SYSTEM* BANTUAN PANGAN NON TUNAI MENGGUNAKAN METODE *TOPSIS* PADA DINAS SOSIAL”**.

## 1.2 RUMUSAN MASALAH

Berikut adalah masalah yang telah dirumuskan oleh penulis :

1. Bagaimana merancang suatu *Decision Support System* untuk membantu dalam mengambil keputusan?
2. Bagaimana dampak *Decision Support System* ini dalam mengelola data penerima bantuan sosial sehingga tepat sesuai kriteria penerimaan?
3. Bagaimana melakukan pengolahan data calon penerima bantuan sosial terhadap kriteria penerimaan agar tersinkronisasi secara keseluruhan?
4. Apakah metode TOPSIS dapat membantu pihak instansi dalam menentukan keputusan yang lebih tepat terhadap calon penerima bantuan social?
5. Bagaimana output yang dihasilkan dalam perancangan *Decision Support System* ini?

## 1.3 BATASAN MASALAH

Agar penelitian ini tidak menyimpang dari maksud penelitian, adapun batasan masalah berdasarkan rumusan masalah diatas :

1. System yang dibangun merupakan salah satu system yang termasuk kedalam Artificial Intelegent yang berfungsi untuk membantu dalam mengambil keputusan.
2. Pengolahan data calon penerima, data kriteria, dan laporan dilakukan agar data yang didapat bisa lebih efektif dan spesifik.
3. Studi kasus dilakukan di Dinas Sosial Kota Padang Panjang.

## 1.4 HIPOTESA

Hipotesa adalah dugaan sementara atau pemecahan masalah yang bersifat sementara dimana akan dibuktikan dengan hasil penelitian yang akan dilakukan.

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penulis membuat hipotesa, yaitu :

1. Diharapkan dengan adanya *Decision Support System* ini dapat membantu pihak Dinas Sosial dalam mengambil keputusan terhadap calon penerima bantuan social agar keputusan yang didapat lebih akurat dan tepat.
2. Diharapkan dengan adanya *Decision Support System* ini dapat memberikan dampak baik kepada pihak Dinas Sosial Kota Padang Panjang, karena data yang diolah akan dilakukan perhitungan dengan menggunakan Metode *TOPSIS* agar kriteria dari calon penerima dapat diperhitungkan dan tepat sasaran.
3. Dengan adanya *Decision Support System* ini diharapkan dapat memiliki output yang saling berhubungan, karena hasil keputusan dari system ini dihitung menggunakan Metode *TOPSIS* yang berdasarkan data kriteria calon penerima dan data pribadi calon penerima sehingga terjadinya suatu relasi antara data tersebut.

4. Dengan adanya system pendukung keputusan ini dan didukung oleh oleh metode TOPSIS diharapkan hasil perhitungan yang didapatkan lebih akurat sehingga mempengaruhi ketepatan hasil keputusan calon penerima bantuan social serta dapat membantu pihak instansi yang sebelumnya memproses data calon penerima masih terbilang manual meskipun sudah menggunakan bantuan aplikasi yaitu Microsoft Excel.
5. Dengan adanya perancangan system pendukung keputusan ini diharapkan dapat mempermudah pengguna dalam melakukan pengecekan data karena output yang dihasilkan dapat diakses dalam suatu system yang dapat menampung banyak data sehingga pengguna hanya perlu mencetak laporan dari system dengan fitur cetak laporan pada system pendukung keputusan yang telah dibangun.

### **1.5 Tujuan Penelitian**

Adapun beberapa tujuan diterapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk membantu pihak Dinas Sosial Kota Padang Panjang dalam mengatasi permasalahan yang ada dan meningkatkan kualitas ketepatan data.
2. Merancang dan menguji *Decision Support System* menggunakan Bahasa Pemrograman *PHP* dan *Database Mysql*.

### **1.6 Manfaat Penelitian**



Dengan adanya skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Bagi Instansi

Sebagai bahan masukan dalam pengukuran kualitas data calon penerima bantuan sosial terhadap ketepatan data kriteria dan laporan pada Dinas Sosial Kota Padang Panjang.

2. Manfaat Bagi Penulis

- a. Sebagai batu loncatan bagi penulis untuk menetapkan dan mengembangkan wawasan dibidang ilmu pengetahuan komputer, sehingga penulis mampu menciptakan suatu sistem yang bermanfaat bagi instansi menggunakan Bahasa Pemrograman PHP dan Database Mysql.
- b. Terimplementasinya pengetahuan yang didapat pada kampus sehingga dapat membantu pihak instansi dalam mengatasi dan menyelesaikan masalah yang ada perihal pekerjaan khususnya pada pengambilan keputusan.
- c. Sebagai acuan bagi penulis dalam penelitian selanjutnya.

3. Manfaat Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat menambah wawasan bagi pembaca dan dapat dipergunakan sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

Biasa juga disebut literature, merupakan bagian yang sangat penting dari laporan penelitian, karena pada sub bab ini juga diungkapkan informasi mengenai tempat penelitian sehingga melandasi dilakukannya penelitian. Tinjauan umum dapat diartikan sebagai rangkaian yang meliputi informasi dari tempat penelitian dan bahan pustaka yang memuat teori-teori yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan.

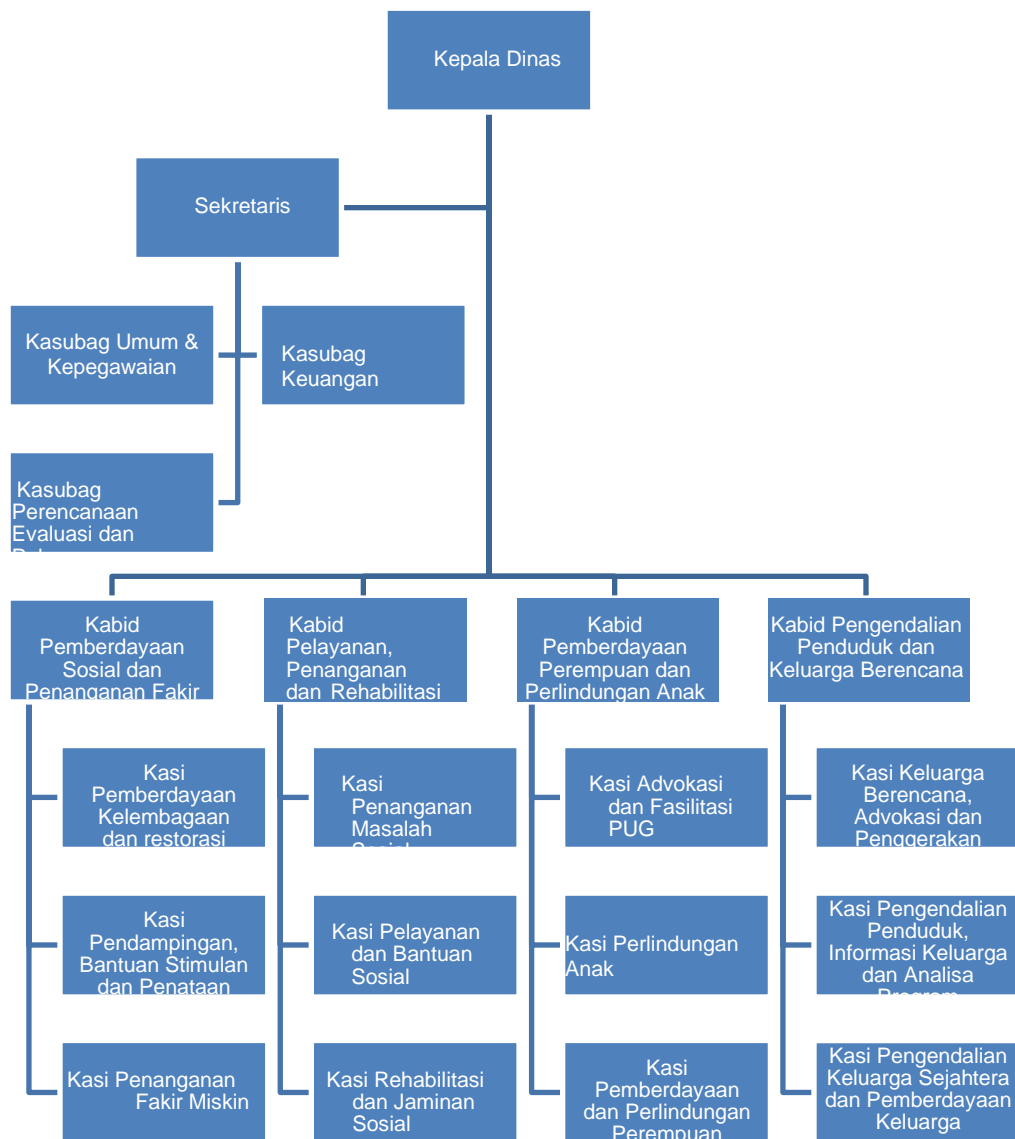
### **1.7.1 Sejarah singkat Dinas Sosial Kota Padang Panjang**

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang, sebelumnya pada tahun 2016 merupakan 3 (tiga) organisasi perangkat daerah yang berbeda yaitu Dinas Sosial, Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dan Kantor Pemberdayaan Masyarakat. Pada tahun 2017 berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi dan Susunan Perangkat Daerah, tiga OPD diatas menjadi 1 (satu) Organisasi Perangkat Daerah dengan nama Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### **1.7.2 Struktur Organisasi**

Struktur organisasi adalah suatu susunan komponen-komponen atau unit-unit kerja dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi menunjukkan bahwa adanya

pembagian kerja dan bagaimana fungsi atau kegiatan-kegiatan berbeda yang dikoordinasikan. Dan selain itu struktur organisasi juga menunjukkan mengenai spesialisasi-spesialisasi dari pekerjaan, saluran perintah maupun penyampaian laporan. Berikut struktur organisasi Dinas Sosial Kota Padang Panjang :



(Sumber : Dinas Sosial Kota Padang Panjang)

## **Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Padang Panjang**

### **1.7.3 Tugas dan Tanggung Jawab**

Sesuai dengan nomenklaturnya Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Padang Panjang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

#### **1. Tugas dan Fungsi**

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Dinas Sosial Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- b. pembinaan teknis penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;

- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan pemerintahan bidang sosial, pengendalian penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- d. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai tugas dan fungsinya.